



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI
KABUPATEN MAGELANG DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR)**

Faza Salsabila Zannuba Rahmah, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296
Telpon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id>. Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 outbreak has affected the tourism sector and caused the closure of tourist attractions in Karangrejo Village. This causes the number of tourist visits to decrease, the PAD of Magelang Regency and people's income to decrease, some tourism actors lose their jobs, and tourist objects become less maintained because there are no tourist visits. This study aims to describe and analyze the implementation of tourism development policies in Karangrejo Village, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of tourism development policies in Karangrejo Village during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews, observation, and literature study. The implementation of tourism development policies in Karangrejo Village during the Covid-19 pandemic has been implemented correctly, although there are aspects that need to be re-optimized. The aspect that needs to be re-optimized is target accuracy. The aspects of policy accuracy, implementation accuracy, environmental accuracy, and process accuracy have been running optimally. The driving factors for implementation consist of policy standards and targets, implementing attitudes, and the social environment. The inhibiting factors for implementation are communication and resources. The advice that can be given is that actors need to socialize directly with the community, more massively and intensively. Actors can socialize through social media. Actors need to improve their capabilities and upgrade their skills and knowledge of tourism actors. This is done so that the services performed can be more professional with the Sapta Pesona program corridor.

Keywords:*Implementation Accuracy, Tourism Development, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah Covid-19 telah menyerang Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Virus Covid-19 ini telah menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat dan sektor-sektor di kehidupan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, seperti sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata dan sebagainya. Adanya wabah virus Covid-19 ini juga mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Pandemi Covid-19, menyebabkan gangguan pada sektor pariwisata.

Wisatawan mancanegara yang melakukan pembatalan pesanan besar-besaran mengakibatkan turunnya kedatangan wisatawan. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan turis asing mencapai 16.106.954 pengunjung. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan menurun drastis, menjadi 4.052.923 pengunjung. Jumlah kunjungan turun kembali pada tahun 2021 yakni menjadi 1.557.530 pengunjung.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten

yang memanfaatkan potensi sektor pariwisata. Kabupaten Magelang memiliki berbagai destinasi di daerahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2020:356-390), destinasi pariwisata di Magelang pada tahun 2019 mencapai 82 wisata, yang terdiri atas 16 wisata buatan, 17 wisata budaya, 24 wisata alam, 5 wisata religi, dan 20 wisata minat khusus.

Munculnya wabah Covid-19, menyebabkan sektor pariwisata di Kabupaten Magelang terdampak. Hal ini terlihat dari fenomena penurunan jumlah wisatawan di Kabupaten Magelang. Mulai dari bulan Januari, jumlah wisatawan masih mencapai 463.443 orang. Adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret, mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yakni menjadi 116.121 orang. Kepala Disparpora Kabupaten Magelang menyatakan, kunjungan wisata di Kabupaten Magelang turun drastis ketika masa awal pandemi. Jumlah turis lokal dan turis asing pada tahun 2019 dapat mencapai 6.523.582

orang, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 1.456.289 orang.

Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat dari penurunan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Magelang. Hal ini dibuktikan dengan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2021, diketahui bahwa pendapatan daerah yaitu sebesar Rp.2.461.908.466.781,00 dan PAD yang diperoleh yakni sebesar Rp.291.447.681.781,00 (Perda No. 12 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021, 2020). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya mencapai 11%. Kemampuan keuangan Kabupaten Magelang masih tergolong kurang, artinya pemerintah belum dapat memaksimalkan potensi daerahnya, untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Desa Karangrejo adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Borobudur. Desa Karangrejo berjarak 3 km dari kawasan wisata

Candi Borobudur. Desa Karangrejo mempunyai keistimewaan dari panorama alam dan kondisi alam Bukit Menoreh yang masih sangat alami, sehingga membuat pelancong tertarik untuk mengunjungi Desa Wisata Karangrejo.

Desa Karangrejo mempunyai berbagai destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Tiga diantaranya adalah Punthuk Setumbu, Bukit Rhema, dan Bukit Barede. Punthuk Setumbu, Bukit Barede, dan Bukit Rhema merupakan objek wisata yang menjadi cukup populer karena merupakan destinasi wisata yang dijadikan salah satu tempat pengambilan gambar untuk salah satu film yang sangat terkenal di Indonesia.

Masuknya wabah Covid-19 di Kabupaten Magelang, membuat pariwisata di Desa Karangrejo juga terdampak. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Desa Karangrejo, selama masa pandemi Covid-19, rata-rata kunjungan wisatawan ke tempat wisata di Desa Karangrejo selama setahun, menurun lebih dari 70% dibandingkan sebelum pandemi.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014–2034 dan Surat Edaran Nomor 556/039/19/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Covid-19 pada Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan seputar implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur di masa pandemi Covid-19?.
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo Kecamatan

Borobudur di masa pandemi Covid-19?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur selama pandemi Covid-19
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur di masa pandemi Covid-19.

D. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan, sebagai upaya pengaturan terhadap proses dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan pemerintah, dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan persoalan publik, juga mengikutsertakan masyarakat di dalam proses politik yang

berlangsung. Dunn (dalam Prihati, 2018:64) menyebutkan bahwa, terdapat beberapa tahapan penting untuk mengatasi masalah publik, antara lain menetapkan agenda kebijakan, merumuskan kebijakan, mengadopsi suatu kebijakan, melaksanakan suatu kebijakan, dan mengevaluasi suatu kebijakan.

Tahap perumusan agenda, ditentukan masalah publik mana yang perlu diselesaikan. Tahap selanjutnya, analisis akan menentukan kemungkinan kebijakan untuk memecahkan masalah, yakni di tahap perumusan kebijakan dengan prosedur *forecasting*. Tahap selanjutnya adalah adopsi kebijakan, di mana pemilihan kebijakan ditentukan oleh dukungan dari para administrator, dan pembuat undang-undang.

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap dimana unit-unit administratif mengerahkan dana dan sumber daya yang tersedia, guna merealisasikan kebijakan yang telah diadopsi. Proses *monitoring* juga dilakukan di tahap implementasi.

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, yaitu berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan apa yang sudah ditetapkan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh orang, pejabat, atau organisasi publik dan swasta yang mempekerjakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari suatu keputusan kebijakan mendasar dalam rangka mengatasi suatu masalah.

Riant Nugroho (2021:51) menyebutkan lima prinsip pokok yang perlu dipenuhi di dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Lima prinsip tersebut yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Ketepatan kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan dapat mengatasi masalah, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh entitas yang berwenang, dan apakah kebijakan dikembangkan sesuai dengan karakter masalah yang perlu ditangani. Ketepatan pelaksana

melihat ketepatan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Ketepatan target berkenaan dengan apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, dan apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lainnya. Ketepatan lingkungan dilihat dari kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ketepatan proses dilihat dari tiga proses yaitu *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *strategic readiness*.

3. Implementasi Kebijakan Pariwisata

Implementasi kebijakan pariwisata merupakan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta, guna mengatur, melaksanakan, dan mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan pariwisata. Adanya kebijakan kepariwisataan ini diharapkan dapat merespon isu publik, dengan cara menggandeng masyarakat serta pihak swasta, untuk membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang potensial.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034, yakni meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. pembangunan destinasi wisata daerah, meliputi pembangunan kawasan strategis pariwisata (KSP), penciptaan daya tarik wisata, pembuatan infrastruktur publik dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan memperluas investasi di bidang pariwisata.

Pengembangan pariwisata daerah yang kedua yaitu perluasan pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata ditingkatkan melalui pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik. Peningkatan industri pariwisata merupakan tahap ketiga dari pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan industri pariwisata dilakukan melalui, peningkatan kualitas dan keragaman

produk yang ditawarkan oleh industri pariwisata, adanya undang-undang dan insentif untuk pertumbuhan industri pariwisata, dan kemitraan antara industri pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan diperkuat.

Selanjutnya pengembangan kelembagaan pariwisata. Pengembangan ini dilakukan melalui koordinasi antar dinas dan kabupaten/kota lain, serta melalui optimalisasi organisasi kepariwisataan dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fenomena yang akan dibahas di dalam tulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang di masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur. Peneliti memilih pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah Desa Karangrejo, pengelola wisata, dan masyarakat umum untuk menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara

yakni wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Desa Karangrejo pada Masa Pandemi Covid-19

1. Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pariwisata maupun dari pihak Desa Karangrejo, diketahui bahwa keduanya saling berkolaborasi untuk meningkatkan pengelolaan usaha pariwisata. Kerja sama kedua aktor ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan kualitas SDM-nya. Pelatihan SDM Pariwisata dalam fenomena tersebut, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang tahun 2014-2034, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dalam pembangunan wisata daerah. Hekmatyar (2016:129) mengemukakan bahwa suatu program dianggap berhasil, jika orang-orang yang terlibat dalam kebijakan tersebut menyadari betapa

pentingnya kebijakan untuk dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, serta meningkatkan pemahaman masyarakat lokal tentang sadar wisata. Menurut Soeswoyo (2020:31) mengemukakan, agar pariwisata dapat berkembang, sangat penting bagi penduduk setempat untuk memahami gagasan kesadaran wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo selama pandemi Covid-19 sudah tepat, karena para aktor dapat mewujudkan sebagian besar tujuan kebijakan dan memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan juga dirumuskan sesuai dengan masalah yang hendak dipecahkan, dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Para aktor di Desa Karangrejo melakukan berbagai kerjasama dengan banyak pihak untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata di desa selama pandemi Covid-19. Hal tersebut membuahkan hasil yakni seperti meningkatnya jumlah wisatawan di Desa Karangrejo, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang bekerja di sektor pariwisata, serta menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang aman dan terkendali dari wabah Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prabawati dkk. (2015:3) yang mengemukakan bahwa, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan persoalan publik yang tumbuh kembang di masyarakat.

2. Ketepatan Pelaksana

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, pemerintah Desa Karangrejo, masyarakat Desa Karangrejo. Kasi industri pariwisata mengemukakan bahwa, keterlibatan

masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo. Kasi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata memiliki fungsi utama dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang, yaitu fungsi pembinaan, dan fungsi pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk mencegah peningkatan penyebaran wabah Covid-19 dengan melakukan sosialisasi terkait kebijakan PPKM Level 3, menghindari dan tidak membuat kerumunan, baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum dengan melibatkan aparat. Pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi, salah satunya dengan pelaku pariwisata guna mendukung pembukaan kembali aktivitas pariwisata di Kabupaten Magelang.

Kepala Disparpora Kabupaten Magelang juga membuat pengaturan teknis terkait pembukaan kembali daya tarik wisata. Aturan teknis pembukaan kembali daya tarik wisata yaitu pengunjung berusia

12 tahun ke atas, daya tarik wisata wajib memberlakukan protokol kesehatan, wisatawan maupun pengelola wisata harus sudah melakukan vaksinasi, daya tarik wisata wajib memberlakukan aplikasi peduli lindungi pada para wisatawan yang berkunjung, jumlah pengunjung DTW dibatasi maksimal 25% dari kapasitas normal, dan homestay dan pondok wisata harus memiliki sertifikat CHSE. Sutriyanti (dalam Lumanauw & Gupta, 2022:70) mengemukakan, protokol kesehatan khususnya di area publik dapat meminimalisir risiko dan dampak penularan Covid-19.

Aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo selama pandemi sudah tepat. Hal ini karena pemerintah desa, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat terlibat langsung, dalam pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ketepatan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo selama masa pandemi

Covid-19 sudah tepat. Hal ini ditandai dengan, adanya evaluasi yang dilakukan oleh para aktor ketika sektor pariwisata ditutup dan lebih tertatanya pariwisata di Desa Karangrejo, baik dari segi sarana dan prasarana, fasilitas umum, hingga peningkatan kesadaran wisata pada masyarakat sebagai subjek pariwisata. Revida dkk., (2020:10) menyebutkan, kenyamanan dan keamanan pengunjung sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia bagi pengunjung.

Lembaga-lembaga desa seperti pokdarwis, BUMDes, dan sebagainya juga berperan untuk mengoptimalkan sosialisasi sapa pesona, memberi pengertian pada masyarakat, khususnya pelaku pariwisata tentang sadar wisata.

3. Ketepatan Target

Riant Nugroho (2021:52) menyatakan bahwa ketepatan target berkenaan dengan target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan kebijakan pengembangan pariwisata tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku pariwisata di Desa Karangrejo, diketahui bahwa sebagian besar pelaku pariwisata sudah mendapatkan vaksinasi, Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa lembaga lembaga desa, baik dari Pokdarwis, BUMDes, pemuda dan pemudi Desa Karangrejo aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Karangrejo.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pariwisata maupun dari pihak Desa Karangrejo, diketahui bahwa keduanya saling berkolaborasi untuk meningkatkan pengelolaan usaha pariwisata. Kerja sama kedua aktor ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan kualitas SDM-nya. Kusworo dan Damanik (dalam Wijayanti et al., 2020:60) menyebutkan bahwa, peningkatan kualitas SDM sangat penting bagi daerah tujuan wisata, karena sumber daya manusia akan menentukan kualitas barang dan jasa pariwisata.

Terjalannya kemitraan dalam pengelolaan usaha pariwisata

tersebut sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang. Irawan (2018:55) mengemukakan, kemitraan bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan memberikan manfaat timbal balik kepada mitra, saling melindungi, memperkuat satu sama lain, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Magelang dan pemerintah Desa Karangrejo saling berinteraksi satu sama lain, untuk mengembangkan pariwisata di Desa Karangrejo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa, setiap objek wisata telah menyediakan wastafel, hand sanitizer, tidak berkerumun, dan anjuran memakai masker. Para wisatawan dan beberapa pelaku pariwisata juga sudah menggunakan masker ketika melakukan aktivitas pariwisata, namun sebagian pelaku pariwisata seperti tukang parkir, penjaja makanan, *front liner* belum taat dengan imbauan pemerintah

tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan para stakeholder belum dilakukan secara maksimal.

Target yang diintervensi dalam kebijakan pengembangan pariwisata sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 dan SE Sekretariat Daerah Nomor 556/039/19/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Covid-19 pada Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang. Kebijakan pengembangan pariwisata ini juga tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain, karena kebijakan lain justru mendukung kebijakan pariwisata.

4. Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Magelang secara penuh mendukung adanya kebijakan pengembangan pariwisata di masa pandemi. Fenomena ini terlihat dari adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang

dengan dinas-dinas lain, yang memiliki hubungan dengan kebijakan pengembangan pariwisata. Dinas-dinas ini antara lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ketepatan lingkungan juga dilihat dari lingkungan eksternal yakni persepsi masyarakat tentang kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo pada masa pandemi. Lingkungan eksternal dalam penelitian ini juga mengacu pada lingkungan sosial yang instrumennya adalah masyarakat dan lingkungan ekonomi yang instrumennya adalah taraf ekonomi masyarakat dan pelaku pariwisata Desa Karangrejo serta perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat Desa Karangrejo mendukung adanya pengembangan pariwisata di Karangrejo pada masa pandemi. Fenomena ini terlihat dari kesediaan masyarakat dan pelaku pariwisata untuk menerima vaksinasi

Covid-19. Masyarakat Desa Karangrejo juga banyak melakukan pengembangan daya tarik wisata, dan ikut serta dalam pelatihan SDM.

Masyarakat Desa Karangrejo juga memiliki kemauan untuk belajar hal baru, yang mana secara tidak langsung juga merupakan bentuk sikap masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Desa Karangrejo. Bukti konkrit dari tindakan ini adalah masyarakat terlibat dalam pelatihan tentang standar homestay yang lebih berkualitas.

Adanya pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata ditutup, sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian daerah. Penutupan daya tarik wisata juga menyebabkan para pelaku pariwisata kehilangan profesinya, yang mana berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi selama pariwisata ditutup. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, dari segi lingkungan eksternal kebijakan pengembangan pariwisata di Desa

Karangrejo, baik dari masyarakat Desa Karangrejo dan Pemerintah Desa Karangrejo memiliki satu persepsi yang sama. Masyarakat juga mendukung adanya kebijakan pengembangan pariwisata di masa pandemi. Kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo juga memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian pelaku wisata di Desa Karangrejo, perekonomian Desa Karangrejo, dan perekonomian Kabupaten Magelang.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu bagaimana masyarakat Desa Karangrejo dan pemerintah Kabupaten Magelang menerima kebijakan pengembangan pariwisata di masa pandemi, bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memahami kebijakan, dan bagaimana kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemerintah Kabupaten Magelang maupun Desa

Karangrejo menerima kebijakan pengembangan pariwisata dan pembatasan kegiatan pada bidang pariwisata di masa pandemi. Pemerintah mendukung kebijakan tersebut, karena tujuan kebijakan tersebut mendukung pengendalian kasus Covid-19 dan menjaga masyarakat dari penularan virus Covid-19. Kepala Desa Karangrejo juga mengungkapkan bahwa, pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo pada masa pandemi tetap dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengembangan pariwisata yang telah dilakukan, mensosialisasikan keamanan berwisata saat pandemi, mengoptimalkan peran Pokdarwis untuk mensosialisasikan sapa pesona dan sadar wisata, serta mengoptimalkan peran BUMDes untuk berinovasi dalam mengembangkan daya tarik wisata.

Masyarakat Desa Karangrejo juga menerima adanya kebijakan pengembangan pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian Covid-19 pada bidang pariwisata. Pada awalnya, masyarakat dan para pelaku pariwisata kaget karena pandemi

menyebabkan sektor pariwisata ditutup. Pandemi Covid-19 menyebabkan kunjungan pariwisata menurun, karena wisatawan lebih memilih mengurungkan niatnya untuk berwisata dan membatasi mobilitasnya agar meminimalisir risiko tertular virus Covid-19. Hal tersebut menyebabkan ekonomi masyarakat terpukul.

Pemerintah Desa Karangrejo disini memiliki peran dalam memberikan pengertian pada masyarakat, bahwa adanya pembatasan kegiatan pariwisata adalah demi meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Desa Karangrejo juga memberi penjelasan positif dan negatif adanya kebijakan pembatasan kegiatan pariwisata terhadap keberlanjutan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo. Pandemi Covid-19 memang membuat kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, namun adanya pembatasan aktivitas pariwisata dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan pariwisata yang lebih optimal dan beradaptasi pelaksanaan kegiatan pariwisata di masa pandemi. Peran pemerintah Karangrejo ini

membuat masyarakat dapat menerima kebijakan pengembangan pariwisata dan pembatasan kegiatan pariwisata di masa pandemi.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Desa Karangrejo selama Pandemi Covid-19

1. Faktor Pendukung

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014–2034 dan SE Sekretariat Daerah Nomor 556/039/19/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Covid-19 pada Bidang Pariwisata Kabupaten Magelang sudah tepat dan terukur, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat antar instansi pelaksana kebijakan. Para pelaksana juga mengetahui dan memahami standar dan tujuan dari kebijakan ini. Perilaku mereka memberikan

kontribusi terhadap pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

b. Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa, para aktor implementasi merespon positif adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo. Fenomena ini terlihat dari, adanya evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangrejo dan Pemerintah Kabupaten Magelang selama pariwisata ditutup ketika pandemi Covid- 19. Evaluasi tersebut dilakukan agar, ketika pariwisata dibuka kembali, pelayanan dapat lebih optimal dan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan lebih tepat. Pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi, terutama bagi masyarakat dan pelaku pariwisata, serta melengkapi fasilitas dan sarana prasarana penunjang CHSE di daya tarik wisata. Hal ini dilakukan guna mendukung pembukaan daya tarik wisata yang mengedepankan wisata yang aman bagi para wisatawan.

Edward III (dalam Patriani & Wuysang, 2022:8147) menggarisbawahi, sikap para aktor kebijakan yang memiliki kecenderungan kuat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Lingkungan Sosial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa, masyarakat mendukung dan antusias dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo. Pemuda dan pemudi Desa Karangrejo tergerak untuk menghidupkan kesenian dan budaya di Desa Karangrejo yang sebelumnya sempat mati suri.

Masyarakat Desa Karangrejo juga memiliki kemauan untuk belajar hal baru, yang mana secara tidak langsung juga merupakan bentuk sikap masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Desa Karangrejo. Bukti konkrit dari tindakan ini adalah masyarakat terlibat dalam pelatihan tentang standar homestay yang lebih berkualitas. Adanya pelatihan tersebut, membuat masyarakat yang

memiliki *homestay* mengembangkan kualitas *homestay* mereka, misalnya dengan memasang sprei putih, menjaga kamar mandi agar tetap bersih, dan sebagainya. Hal tersebut akan membuat tamu yang berkunjung lebih nyaman.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo selama wabah Covid-19 adalah kurangnya sumber daya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu wisatawan yang baru pertama kali ke Desa Karangrejo. Wisatawan tersebut menyebutkan bahwa, saat ia pertama kali berkunjung ke Balkondes Karangrejo, pramuwisata tidak memberi sambutan yang baik ataupun arahan pada wisatawan tersebut.

Kemampuan pelaksana mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memaksimalkan hasil implementasi kebijakan, sangat penting untuk keberhasilan proses implementasi. Revida et al., (2020:8) mengemukakan bahwa adanya

sumber daya yang membuat orang merasa senang dan nyaman, dapat menjadi salah satu unsur yang berkontribusi terhadap dasar daya tarik wisata.

b. Komunikasi

Koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang jelas dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, merupakan komponen kunci keberhasilan implementasi kebijakan Dinas pariwisata Kabupaten Magelang menyatakan bahwa, mereka berkomunikasi dengan masyarakat agar tetap mengedepankan keamanan berwisata saat pandemi, dan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun tren kasus Covid-19 sudah melandai.

Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa, setiap objek wisata telah menyediakan wastafel, *hand sanitizer*, tidak berkerumun, dan anjuran memakai masker, namun sebagian pelaku pariwisata seperti tukang parkir, penjaja makanan, *front liner*, dan lain-lain belum taat dengan imbauan pemerintah.

Proses pelaksanaan kebijakan membutuhkan komunikasi yang

efektif, karena para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Pelaksana juga harus mendapatkan arahan secara tepat dan konsisten untuk melaksanakan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan menyadari apa yang diharapkan dari mereka dan mengetahui apa yang harus dilakukan, maka akan terjadi komunikasi yang efektif.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo selama pandemi Covid-19 sudah tepat pelaksanaannya, meskipun terdapat aspek yang perlu dioptimalkan kembali. Adapun aspek yang perlu dioptimalkan kembali yaitu aspek ketepatan target. Kekurangan dari aspek ketepatan target yakni belum semua pelaku pariwisata menerapkan sapta pesona dan protokol kesehatan dengan maksimal. Sosialisasi yang dilakukan *stakeholders* dengan para pelaku wisata secara langsung belum merata, sehingga kesadaran wisata para pelaku wisata masih kurang. Aspek ketepatan kebijakan,

ketepatan pelaksana, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses sudah berjalan dengan optimal.

Faktor pendukung yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Fenomena ini terlihat dari tindakan para aktor yang berupaya untuk memecahkan masalah yang ada dan mencapai tujuan kebijakan. Faktor pendukung yang kedua yakni sikap pelaksana. Fenomena ini terlihat dari adanya respon positif para aktor implementasi terhadap kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo. Faktor pendukung yang ketiga yakni lingkungan sosial. Hal ini terlihat dari adanya kemauan masyarakat untuk belajar hal baru, yang secara tidak langsung masyarakat menjadi ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata di Karangrejo.

Faktor penghambat yang pertama dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yakni sumber daya. Sebagian masyarakat dan para pelaku pariwisata belum mengimplementasikan sapta pesona dengan maksimal. Faktor penghambat yang kedua yakni komunikasi, dimana sosialisasi

tentang keamanan berwisata dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan sosialisasi sapta pesona belum dilakukan secara merata. Kekurangan ini menghambat ketercapaian dari aspek ketepatan target.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Karangrejo di masa pandemi Covid-19, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yakni :

1. Komunikasi masih menjadi faktor penghambat di dalam pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi sapta pesona dan keamanan berwisata saat pandemi belum merata dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pelaku wisata. Peneliti menyarankan agar para aktor melakukan sosialisasi dengan lebih masif dan intensif, serta melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lain-lain.
2. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat di dalam

pelaksanaan kebijakan. Masyarakat maupun pelaku pariwisata belum sepenuhnya menerapkan sapta pesona dengan baik. Peneliti memberi saran agar para aktor meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pelaku pariwisata. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan secara lebih profesional dengan koridor program sapta pesona.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>.
- Hekmatyar, G. A., Kismartini, & Santoso, R. S. (2016). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan Di Kecamatan Banyumanik. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2, 5(1), 122–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i1.10417>.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan*

- Akademik, 1(3), 13–26.
<http://www.stiacimahi.ac.id/w-p-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>.
- Irawan, D. (2018). Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah/Besar untuk Komoditi Unggulan. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 53–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.52>.
- Lumanauw, N., & Gupta, I. G. B. W. (2022). Event Vaksinasi Pekerja Pariwisata Hotel Grand Hyatt Bali Berbasis Clean Health Safety Environmental Sustainability. *Widya Manajemen*, 4(1), 67–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v4i1>.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan (Y. Masda (ed.); 6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Patriani, I., & Wuysang, J. M. (2022). Analisis Faktor Komunikasi dan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kantor Camat Sekadau Hilir, Sekadau. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(Juni), 8141–8150.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntaxliterate.v7i6.7787>.
- Prabawati, I., Tjitjik, R., & Badrudin, K. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Unesa University Press.
- Revida, E., Gaspersz, S., Uktolseja, L. J., Nasrullah, Warella, S. Y., Nurmiati, Alwi, M. H., Simarmata, H. M. P., Manurung, T., & Purba, R. A. (2020). Pengantar Pariwisata (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Soeswoyo, D. M. (2020). Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(1), 29–35.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2581255&val=24246&title=Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2581255&val=24246&title=Peningkatan%20Kualitas%20Masyarakat%20Melalui%20Sosialisasi%20Sadar%20Wisata%20dan%20Sapta%20Pesona).
- Wijayanti, A., Heni, W., Atun, Y., & Wisnu, H. (2020). Pelatihan Sadar Wisata dan Sapta Pesona Bagi Masyarakat Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 58–68.